



JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)
<https://doi.org/10.58355/justices.v5i3.227>

Vol. 5 No. 3 (2026)
pp. 79-85

Research Article

Analisis Pasar Modal Terhadap Skandal Korupsi Asabri: Manipulasi Investasi yang Merugikan Negara Hingga Rp 23,73 Triliun

Yenrizka Gusmaria, I Ketut Astawa

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Corresponding Author, E-mail; ygusmaria@gmail.com  (Yenrizka Gusmaria)



Copyright © 2026 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 13, 2026
Accepted : August 15, 2026

Revised : July 17, 2026
Available online : September 04, 2026

How to Cite: Yenrizka Gusmaria, & I Ketut Astawa. (2026). Capital Market Analysis of the Asabri Corruption Scandal: Investment Manipulation Causing State Losses of Up to IDR 23.73 Trillion. *JUSTICES: Journal of Law*, 5(3), 79-85. <https://doi.org/10.58355/justices.v5i3.227>

Capital Market Analysis of the Asabri Corruption Scandal: Investment Manipulation Causing State Losses of Up to IDR 23.73 Trillion

Abstract. The corruption scandal involving PT Asabri (Persero) has become one of the biggest cases in Indonesian financial history, with state losses reaching IDR 23.73 trillion. This case began with the manipulation of investment fund management in the period 2011 to 2019, carried out by Asabri management in collaboration with external parties, Benny Tjokrosaputro (Bentjok), Heru Hidayat, and LP. The two main directors of Asabri during that period, ARD and SW, made an agreement with the three parties to manage the company's investment portfolio, which included stocks and mutual funds whose values had been manipulated. In this transaction, the stocks purchased by Asabri were priced higher than their actual value, and after entering the portfolio, the transaction was carried out to benefit external parties in a false manner, which was detrimental to the company. This manipulation also involved the sale of shares at a lower price, which ultimately harmed Asabri. The losses were

further exacerbated by the purchase of manipulated shares through mutual funds controlled by the same party. The results of the audit by the Supreme Audit Agency (BPK) show that the total state loss due to this scandal reached Rp 23.73 trillion. This case reflects the weak supervision in the management of state pension funds and is a valuable lesson in efforts to prevent corruption in the future.

Keywords: Asabri Corruption Scandal, Investment Manipulation, State Losses

Abstrak. Skandal korupsi yang melibatkan PT Asabri (Persero) menjadi salah satu kasus terbesar dalam sejarah keuangan Indonesia, dengan kerugian negara mencapai Rp 23,73 triliun. Kasus ini berawal dari manipulasi pengelolaan dana investasi pada periode 2011 hingga 2019, yang dilakukan oleh manajemen Asabri bekerja sama dengan pihak eksternal, Benny Tjokrosaputro (Bentjok), Heru Hidayat, dan LP. Kedua direktur utama Asabri pada periode tersebut, ARD dan SW, melakukan kesepakatan dengan ketiga pihak untuk mengatur portofolio investasi perusahaan, yang mencakup saham dan reksa dana yang telah dimanipulasi nilainya. Dalam transaksi ini, saham-saham yang dibeli Asabri dihargai lebih tinggi dari nilai sebenarnya, dan setelah masuk ke portofolio, transaksi dilakukan untuk menguntungkan pihak eksternal dengan cara semu, yang merugikan perusahaan. Manipulasi ini juga melibatkan penjualan saham dengan harga yang lebih rendah, yang akhirnya merugikan Asabri. Kerugian tersebut semakin diperburuk dengan pembelian saham yang telah dimanipulasi melalui reksa dana yang dikendalikan oleh pihak yang sama. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa total kerugian negara akibat skandal ini mencapai Rp 23,73 triliun. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan dana pensiun negara dan menjadi pelajaran berharga dalam upaya pencegahan korupsi di masa depan.

Kata kunci: Skandal Korupsi Asabri, Manipulasi Investasi, Kerugian Negara

PENDAHULUAN

Skandal korupsi yang melibatkan PT Asabri (Persero) menjadi salah satu kasus keuangan terbesar dan paling mencuat dalam sejarah Indonesia. PT Asabri adalah perusahaan negara yang memiliki peran penting dalam mengelola dana pensiun untuk anggota TNI dan Polri. Dana pensiun ini, yang seharusnya digunakan untuk memastikan kesejahteraan para purnawirawan, justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian yang diakibatkan oleh skandal ini mencapai Rp 23,73 triliun, sebuah angka yang mencerminkan betapa seriusnya pelanggaran yang terjadi.

Kasus ini bermula dari praktik manipulasi investasi yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk manajemen PT Asabri, serta individu-individu eksternal seperti Benny Tjokrosaputro (Bentjok), Heru Hidayat, dan LP. Pada periode 2011 hingga 2019, manajemen Asabri melakukan kesepakatan dengan para pihak tersebut untuk mengendalikan portofolio investasi Asabri yang terdiri dari saham dan reksa dana. Dalam transaksi ini, saham-saham yang dibeli oleh Asabri ternyata dihargai lebih tinggi dari nilai pasar yang seharusnya, dengan tujuan untuk menunjukkan kinerja investasi yang tampak baik, padahal secara substansial, transaksi tersebut hanyalah transaksi semu yang menguntungkan pihak-pihak eksternal dan merugikan Asabri.

Manipulasi investasi ini dilakukan melalui mekanisme yang sangat kompleks, mulai dari penukaran saham yang seharusnya tidak dimiliki oleh Asabri, hingga pengaturan harga yang tidak realistis dalam transaksi saham dan reksa dana. Hal ini

dilakukan dengan sengaja untuk menciptakan gambaran bahwa portofolio investasi Asabri berkinerja baik, padahal kenyataannya, investasi tersebut merugikan perusahaan dan negara. Setelah saham-saham tersebut terlibat dalam portofolio Asabri, transaksi dilakukan untuk mempertahankan harga saham tetap tinggi, meskipun transaksi yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah apapun bagi Asabri. Bahkan, saham-saham yang telah dibeli dengan harga yang lebih tinggi kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh lebih rendah, mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar.

Skandal ini mencerminkan betapa rapuhnya sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan negara dalam pengelolaan dana pensiun. Meskipun Asabri memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam menjaga kesejahteraan purnawirawan TNI dan Polri, oknum-oknum di dalamnya justru mengeksploitasi kepercayaan tersebut demi keuntungan pribadi. Selain itu, kasus ini juga menggambarkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam investasi yang melibatkan dana publik. Dampak dari skandal ini tidak hanya dirasakan oleh Asabri sebagai entitas, tetapi juga oleh para penerima manfaat, yaitu para anggota TNI dan Polri yang tergantung pada dana pensiun mereka.

Dengan adanya skandal korupsi ini, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan keuangan negara, khususnya yang berkaitan dengan dana pensiun dan investasi. Reformasi dalam pengawasan dan peningkatan transparansi harus menjadi agenda utama agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Selain itu, proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan keadilan dan menghukum para pelaku sesuai dengan perbuatannya, sehingga memberi efek jera bagi pihak-pihak lain yang berniat melakukan praktik korupsi serupa. Skandal korupsi Asabri ini menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, untuk terus menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat.

METODE

Metode studi pustaka yang digunakan dalam penelitian mengenai "Skandal Korupsi Asabri: Manipulasi Investasi yang Merugikan Negara Hingga Rp 23,73 Triliun" ini mengacu pada pengumpulan dan analisis literatur yang relevan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum, keuangan, dan manajerial yang terkait dengan kasus tersebut. Pendekatan ini dimulai dengan kajian terhadap laporan audit yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menjadi salah satu sumber utama untuk mengidentifikasi besarnya kerugian negara akibat praktik korupsi dalam pengelolaan dana investasi Asabri. Hasil audit ini memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme manipulasi investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, serta mengungkapkan bagaimana transaksi semu dan penempatan saham dengan harga yang dimanipulasi menguntungkan pihak eksternal, namun merugikan perusahaan dan negara.

Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur terkait dengan pengelolaan dana pensiun dan perusahaan negara, terutama mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Studi-

studi sebelumnya mengenai skandal serupa, seperti kasus Jiwasraya, memberikan perspektif tambahan dalam membandingkan pola dan mekanisme korupsi yang terjadi di dua lembaga ini, yang keduanya berhubungan dengan pengelolaan dana pensiun milik negara. Literatur yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan risiko investasi juga digunakan untuk memahami lebih dalam mengenai pengelolaan portofolio investasi yang melibatkan saham dan reksa dana, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dalam konteks hukum, studi pustaka ini mencakup berbagai regulasi yang mengatur tentang pengelolaan perusahaan milik negara, termasuk peraturan terkait tata kelola dan pengawasan dana pensiun, serta undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga mengidentifikasi literatur yang membahas pentingnya sistem pengawasan yang efektif dalam menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi dalam pengelolaan dana publik. Literatur tentang pengaruh korupsi terhadap ekonomi negara, baik dalam jangka pendek maupun panjang, turut menjadi referensi untuk menilai dampak luas dari skandal ini terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka yang menyeluruh ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi terjadinya skandal korupsi di PT Asabri, serta memberikan rekomendasi yang berbasis pada temuan-temuan dari berbagai sumber literatur terkait, yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

PEMBAHASAN

Skandal korupsi yang melibatkan PT Asabri (Persero) merupakan salah satu kasus keuangan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. PT Asabri, sebuah perusahaan negara yang bertugas mengelola dana pensiun untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), seharusnya memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan kesejahteraan para purnawirawan dan anggota aktif kedua institusi tersebut. Namun, praktik manipulasi investasi yang dilakukan oleh manajemen Asabri antara tahun 2011 hingga 2019 justru menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai Rp 23,73 triliun, seperti yang tercatat dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kasus ini bermula dari praktik manipulasi portofolio investasi yang melibatkan sejumlah pihak internal dan eksternal. Selama periode 2011-2019, manajemen Asabri melakukan kesepakatan dengan Benny Tjokrosaputro (Bentjok), Heru Hidayat, dan LP, untuk mengatur dan mengendalikan portofolio investasi Asabri, yang sebagian besar terdiri dari saham dan reksa dana. Ketiga individu ini bukanlah pihak yang seharusnya terlibat dalam pengelolaan investasi, karena mereka bukan manajer investasi yang terdaftar atau konsultan keuangan yang sah. Dalam kasus ini, mereka justru menjadi pihak yang mengendalikan investasi Asabri dan memanipulasi harga saham yang dibeli dan dijual, demi kepentingan pribadi mereka.

Manipulasi investasi ini dilakukan dengan cara membeli saham-saham tertentu dengan harga yang dimanipulasi, sehingga nilainya lebih tinggi dari harga pasar yang sebenarnya. Saham-saham yang dipilih dan dimasukkan ke dalam

portofolio Asabri juga merupakan saham yang dikendalikan oleh pihak eksternal tersebut. Tujuan dari manipulasi ini adalah untuk menciptakan kesan bahwa portofolio investasi Asabri memiliki kinerja yang baik dan menguntungkan, padahal kenyataannya saham-saham tersebut tidak bernilai sebagaimana mestinya. Selain itu, transaksi yang dilakukan selama ini juga berfokus pada transaksi semu yang tidak memberikan keuntungan nyata bagi Asabri, namun justru menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam manipulasi tersebut.

Selama dua periode kepemimpinan yang berbeda, yaitu 2011-2016 dan 2016-2020, transaksi-transaksi tersebut terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Sebagai hasilnya, ketika Asabri menjual saham-saham yang telah dibeli dengan harga yang lebih tinggi tersebut, mereka justru merugi, karena harga jualnya lebih rendah dari harga beli yang telah dimanipulasi. Saham-saham ini kemudian dibeli kembali oleh pihak-pihak terkait melalui nominee (penyamar), dan kemudian dijual kembali oleh Asabri melalui reksa dana yang juga dikelola oleh pihak yang sama. Transaksi ini, meskipun tampak seperti investasi yang sah, sejatinya adalah manipulasi yang dirancang untuk mengalihkan dana dari perusahaan negara menuju kantong pribadi pihak-pihak yang terlibat.

Kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik-praktik manipulatif ini sangatlah besar, dan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh PT Asabri, tetapi juga oleh para penerima manfaat dana pensiun yang seharusnya mendapat hak mereka secara adil dan tepat waktu. Dalam hal ini, kesalahan pengelolaan dana pensiun oleh Asabri mencerminkan betapa rapuhnya sistem pengawasan terhadap pengelolaan dana publik di Indonesia, terutama dalam hal investasi dan manajemen keuangan negara. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya manipulasi ini adalah lemahnya pengawasan internal dan eksternal terhadap proses pengelolaan investasi di Asabri.

Selain itu, skandal ini juga menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem akuntabilitas yang harusnya diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam sistem yang ideal, pengelolaan dana pensiun harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan manajer investasi yang memiliki reputasi baik dan memiliki kewajiban untuk menjaga integritas dalam mengelola dana publik. Namun, dalam kasus Asabri, tidak ada pengawasan yang cukup ketat terhadap pengelolaan investasi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam skandal ini justru berhasil memanipulasi sistem untuk keuntungan pribadi.

Dampak dari skandal ini jauh lebih luas daripada sekadar kerugian finansial yang dialami oleh Asabri. Skandal ini juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pensiun, khususnya bagi anggota TNI dan Polri yang mengandalkan dana pensiun tersebut untuk menjamin masa depan mereka setelah pensiun. Selain itu, skandal ini mencerminkan buruknya tata kelola perusahaan milik negara yang seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformasi dalam sistem pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pengelolaan dana pensiun dan investasi, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Skandal ini juga memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya sistem pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengawasan yang efektif, baik dari internal maupun eksternal, sangat diperlukan untuk mencegah manipulasi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana publik. Selain itu, kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) di seluruh perusahaan milik negara, termasuk dalam hal pengelolaan investasi.

Secara keseluruhan, skandal korupsi Asabri ini merupakan gambaran nyata dari bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi keuangan dapat merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan negara, memperbaiki regulasi yang ada, dan memperkuat pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang serupa di masa depan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai skandal korupsi PT Asabri ini menyoroti betapa besar dampak yang ditimbulkan dari manipulasi investasi yang terjadi selama hampir satu dekade. Skandal ini tidak hanya merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar, mencapai Rp 23,73 triliun, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pensiun bagi anggota TNI dan Polri yang seharusnya terjamin. Praktik manipulasi yang melibatkan pihak-pihak eksternal yang tidak berkompeten dalam bidang manajemen investasi, serta pengelolaan saham dan reksa dana yang dilakukan dengan harga yang telah dimanipulasi, menunjukkan adanya lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal terhadap keuangan negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam skandal ini, termasuk pejabat Asabri dan individu-individu yang mengendalikan portofolio investasi, berhasil mengeksploitasi kelemahan dalam tata kelola perusahaan milik negara, sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar.

Selain itu, skandal ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, khususnya dalam hal pengelolaan dana pensiun. Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan perbaikan dalam sistem pengawasan dan regulasi yang ada, agar praktik manipulasi dan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara tidak terulang. Reformasi dalam pengelolaan dana pensiun, penguatan mekanisme pengawasan, serta penerapan sistem akuntabilitas yang lebih ketat perlu menjadi prioritas utama guna memastikan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan para purnawirawan TNI dan Polri dapat dikelola dengan baik dan transparan. Melalui upaya tersebut, diharapkan sistem pengelolaan dana publik di Indonesia dapat lebih berintegritas dan lebih terjamin, sehingga kejadian serupa dapat dicegah di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Putri, U. R., Dwiharyadi, A., & Handayani, D. (2024). Analisis Pengaruh Rapat Komite Audit, Audit Internal, dan Whistleblowing System Terhadap Potensi Fraudulent Financial Reporting. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(4), 29-41.

HASIBUAN, N. H. *TATA KELOLA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI (STUDI UU No. 20/2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Reskino, R., Harnovinsah, H., & Hamidah, S. (2021). Analisis Fraud Tendency Melalui Pendekatan Pentagon Fraud: Unethical Behavior Sebagai Mediator. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(1), 98-117.

Christian, N., Arlina, A., Tryany, J., Liang, V. L., & Rerung, Y. (2024). Eksplorasi Kecurangan Keuangan PT. Asabri (Persero) Melalui Pendekatan Cash Flow Shenanigans. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 4(2), 182-191.

MAHENDRA, R. A., & ARIYANI, E. (2023). *MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI UANG VIRTUAL (CRYPTOCURRENCY) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus PT. ASABRI)* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).